

**Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
Tahun 2022 Sampai Dengan Bulan April 2022**

No.	Judul
1	Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Bidang Pajak Penghasilan
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan;
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean.
5	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Pengganti PMK-189, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah yang Masih Harus Dibayar
6	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Bukper (Pengganti PMK-239), Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
8	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
9	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Pelunasan Kerugian pada Pendapatan Negara beserta Sanksi Administratif untuk Kepentingan Penerimaan Negara
10	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencegahan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
11	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tata Cara Penyidikan tanpa kehadiran tersangka
12	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan
13	Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
14	Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya
15	Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
16	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan;
17	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
18	Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan

	Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
19	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang Diterima atau Diperoleh Orang Pribadi;
20	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penghasilan/Penyerahan Sehubungan dengan Penjualan Emas Perhiasan dan/atau Pemberian Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan;
21	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
22	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa yang Dilakukan oleh Pengusaha Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
23	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil untuk Pajak Pertambahan Nilai
24	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
25	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan Disetor bagi Pengusaha Kena Pajak yang Memiliki Peredaran Usaha dalam 1 (Satu) Tahun Buku Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
26	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan Disetor bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
27	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan Disetor bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
28	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan Disetor bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
29	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
30	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Liquefied Petroleum Gas Tertentu yang Menggunakan Nilai Lain atau Besaran Tertentu
31	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian
32	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
33	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
34	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
35	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut dan Disetor atas Penyerahan Jasa Jalan Tol
36	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
37	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Karbon

38	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik
39	RKMK tentang Penetapan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
40	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
41	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
42	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
43	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai oleh Pabrik Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Emas Perhiasan dan/atau Pemberian Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan
44	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
45	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
46	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pematangan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
47	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Usaha, Penghitungan, Pemungutan, Pembayaran atau Penyetoran, Pelaporan, dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon serta Pengurangan Pajak Karbon.
48	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
49	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sedang dalam proses pembahasan dengan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
50	Rancangan Perdirjen Pajak tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pengusaha Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
51	Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak Untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan
52	Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kawasan Berikat.

53	Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan Pembuatan Faktur Pajak dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak serta Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Sehubungan Dengan Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
